

EVALUASI KEBIJAKAN OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Desheriyanto

Program Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru

Abstract: Evaluation of the Operational Policy Civil Service Police Unit. This study aims to determine the operational policy evaluation Civil Service Police Unit in the city of Pekanbaru. This research is a qualitative descriptive study. The informants are Kabid Trantib, members of municipal police, traders and the public. Data collection techniques used in this study was the observation of interviews and documentation. The results showed that the implementation of the operational police civil service in the policing of street vendors in the city of Pekanbaru masihbelum optimal, it can be seen from the effectiveness achieved, efficient use of resources, adequate to the solutions provided to traders and problems resposivitas field officers and accuracy against the benefits gained. Factors that constrain the implementation of operational policy of the civil service police unit in the city of Pekanbaru is the dissemination to the public of the rules in force, availability of resources, the attitude of enforcement agents in the field and support from the community.

Keywords: policy evaluation, a police unit of the civil service, effectiveness and efficiency

Abstrak: Evaluasi Kebijakan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi kebijakan operasional Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Informan penelitian adalah Kabid Trantib, anggota Satpol PP, pedagang dan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi wawancara dan dokumentasi yang. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pelaksanaan operasional polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru masihbelum optimal, hal ini dapat dilihat dari efektifitas yang dicapai, efisiensi penggunaan sumber daya, kecukupan terhadap solusi masalah yang diberikan kepada pedagang dan masalah resposivitas petugas lapangan serta ketepatan terhadap manfaat yang diperoleh. Faktor yang menjadi kendala pelaksanaan kebijakan operasional satuan polisi pamong praja di Kota Pekanbaru adalah sosialisasi kepada masyarakat akan aturan yang berlaku, ketersediaan sumberdaya, sikap petugas pelaksana di lapangan dan dukungan dari masyarakat.

Kata kunci: evaluasi kebijakan, satuan polisi pamong praja, efektivitas, efisiensi

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 148 ayat (1) menyatakan untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Pembentukan Polisi Pamong Praja diperlukan karena dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan di daerah agar berjalan dengan baik dan lancar apabila terjaga ketentraman dan ketertiban dimana kondisi

masyarakat dan pemerintah yang dinamis dapat melaksanakan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur.

Keberadaan satuan polisi pamong praja sebagai perangkat daerah mempunyai peran yang strategis dalam membantu Kepala Daerah di bidang penyelenggaraan pemerintahan umum, khususnya dalam rangka membina ketentraman dan ketertiban di wilayah serta penegakan atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah.

Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja adalah memberikan pembekalan

terhadap masyarakat tentang hakekat dan pentingnya pemeliharaan ketertiban dan ketentraman sebagai suatu kondisi mutlak yang dibutuhkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Kota Pekanbaru merupakan kota yang sedang membangun dan juga sedang berkembang dengan pesatnya, penduduk dan kebutuhan penduduk terus meningkat, pembangunan dan kegiatan pembangunan terlihat diseluruh penjuru kota ini, pembangunan perumahan, pusat perdagangan dan pertokoan serta sarana umum seperti pasar modern dan pasar tradisional terus menjadi ciri khusus yang menonjol di kota Pekanbaru.

Persoalan yang terjadi bahwa perkembangan hasil kerja yang dicapai satpol PP cenderung mengalami fluktuasi. Berangkat dari persoalan dan juga tugas pokok dan fungsi satpol PP Kota Pekanbaru dalam melaksanakan operasi penertiban terkesan belum berjalan dengan baik.

Pengertian evaluasi menurut Charles O. Jones dalam Aprilia (2009) adalah "*evaluation is an activity which can contribute greatly to the understanding and improvement of policy development and implementation*" (evaluasi adalah kegiatan yang dapat menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan dapat pula membantu penyempurnaan pelaksanaan kebijakan beserta perkembangannya). Pengertian tersebut menjelaskan bahwa kegiatan evaluasi dapat mengetahui apakah pelaksanaan suatu program sudah sesuai dengan tujuan utama, yang selanjutnya kegiatan evaluasi tersebut dapat menjadi tolak ukur apakah suatu kebijakan atau kegiatan dapat dikatakan layak diteruskan, perlu diperbaiki atau dihentikan kegiatannya.

Menurut PP No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

Menurut Dunn (2003) bahwa kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik adalah:

- a. Efektifitas, apakah hasil yang diinginkan sudah tercapai?
- b. Efisiensi, seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
- c. Kecukupan, seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
- d. Perataan, apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu?
- e. Responsivitas, apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi dan nilai-nilai kelompok tertentu?
- f. Ketepatan, apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

METODE

Penelitian ini akan dilaksanakan di kota Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif menggunakan pendekatan studi kasus. yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pedagang yang berjualan di pasar pagi arengka yang terimbas kegiatan penertiban oleh Sapol PP dan juga dari satpol PP itu sendiri. Analisis data menggunakan teknik kualitatif.

HASIL

Efektifitas

Aturan mengenai ketertiban umum yang dilakukan oleh petugas pemerintah, apakah pelaksanaan dilapangan sudah berjalan efektif, jawaban mereka penjelasannya Peraturan mengenai ketertiban umum mengetahui dan sudah pernah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Kenyataan dilapangan yang terlihat penertiban efektif pada waktu kegiatan masih berlangsung saja. Kalau anggota Satuan Polisi Pamong Praja sudah tidak ada atau tidak berada di lokasi, maka pelanggar berangsur kembali lagi.

Efisiensi

Pelanggaran ketertiban masih kem-

balik beraktifitas setelah dilakukan penertiban bahwa Disaat penertiban selesai dilaksanakan dapat dilihat kalau aktifitas yang ditertibkan tidak ada. Namun sebulan atau lebih setelah itu kembali lagi satu-persatu kelokasi, masih sering kembali terjadi pelanggaran. Ini menandakan bahwa tindakan melakukan penertiban masih belum berjalan sebagaimana diharapkan oleh pedagang kaki lima dalam mendapatkan tempat berjualan dan masalah penghasilan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Perataan

Mengenai apakah penertiban diberlakukan disemua tempat di kota pekanbaru bahwa ternyata masih banyak tempat yang masih belum menjadi fokus ditertibkan. Lokasi yang sudah ditertibkan baru sampai pada tempat-tempat yang menjadi pusat perhatian dari masyarakat saja, padahal banyak lokasi baru yang harus diperhatikan sebelum semakin parah dan sulit ditertibkan.

Responsivitas

Mengenai apakah petugas satpol PP di lapangan mendengarkan keluhan dari masyarakat dalam melaksanakan penertiban ternyata petugas sebelum melaksanakan penertiban sudah mendapat laporan dari masyarakat. Petugas pun disaat penertiban dilaksanakan bisa memberi toleransi bila masyarakat mau patuh dan mau berkerjasama. Dan keluhan warga memang di dengarkan oleh Satuan Polisi pamong Praja akan tetapi tidak semua keluhan dapat diterima dan dilaksanakan, tetapi yang dilaksanakan pun belum maksimal hasilnya.

Ketepatan

Mengenai apakah manfaat yang dapat saudara ambil dari kegiatan penertiban di lapangan ini oleh satpol PP ternyata masyarakat merasakan dampak dan manfaat yang positif dari penertiban, seperti penertiban PKL dipasar-pasar, trotoar dan jalan umum lain. Penertiban tentu membuat jalan jadi lancar dan berkurang kemacetannya. Manfaatnya terasa bila lokasi yang ditertibkan

sudah dapat membuat fasilitas umum yang dipergunakan warga menjadi nyaman dan tertib serta berfungsi sebagaimana mestinya.

PEMBAHASAN

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, yang disingkat dengan Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 85 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Hasil evaluasi kebijakan operasional satuan polisi pamong praja dilihat dari efektivitas penertiban umum hanya berlangsung pada waktu kegiatan dilakukan, tetapi apabila petugas Satuan Pamong Praja tidak ada dilokasi pelanggaran terjadi lagi. Sikap petugas membiarkan pelanggaran oleh pedagang kaki lima (PKL) terhadap penertiban umum setelah petugas tidak ada dilokasi, seakan-akan merupakan suatu kebijakan publik yang dikemukakan R. Dye dalam Irfan Islami (1997), "is whatever governments choose to do or to do" (apapun yang dipilih untuk melakukan atau tidak melakukan). Keluhan-keluhan masyarakat memang dapat tanggapan dari petugas, namun belum semua keluhan itu dapat direalisasikan. Walaupun penertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja belum efektif, tetapi masyarakat sudah merasakan manfaatnya terutama penertiban pedagang kaki lima (PKL) dipasar pasar, ditrotoar dan dijalan umum sehingga membuat jalan jadi lancar dan kemacetan berkurang.

Faktor faktor yang menyebabkan belum efektifnya penertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

a. Sosialisasi

Sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat amat terasa kurang dilakukan oleh Dinas terkait maupun Satuan Polisi

Pamong Praja. Pada saat ditemukan pelanggaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagian besar masyarakat (pelanggar) belum paham akan peraturan yang telah mereka langgar.

b. Ketersediaan Sumberdaya

Ketersediaan SDM masih dirasa kurang, sebab perkembangan pelanggaran tidak ditopang oleh jumlah personel. Ketersediaan personel yang cukup dibutuhkan dalam mengantisipasi perkembangan kota yang sangat pesat. Ketersediaan anggaran masih sangat kurang dibandingkan dengan tugas penegakan Peraturan Daerah yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Fasilitas atau pun alat kelengkapan penunjang tugas masih dirasa sangat kurang.

c. Sikap Petugas

Dalam pelaksanaan tugas, para petugas masih memiliki sikap yang kurang simpatik walaupun sudah banyak perubahan sikap disbanding dimasa lalu dan kurangnya pelatihan-pelatihan terhadap petugas dalam pelaksanaan tugas. Hal ini disebabkan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja yang juga terbatas.

d. Dukungan dari masyarakat

Dukungan masyarakat kami rasakan semakin meningkat. Sebab pelaksanaan penertiban sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dukungan dapat terlihat dengan adanya sikap kooperatif masyarakat dalam setiap penertiban. Pengaduan tentang pelanggaran Peraturan Daerah dilapangan juga jadi bentuk dukungan yang diberikan masyarakat.

Menurut tanggapan masyarakat mengenai sikap pelanggar dalam hal ini adalah pedagang kaki lima.

Sikap para pelanggar yang tidak kooperatif ditambah ada beberapa pihak memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadinya membuat penertiban tidak maksimal serta cenderung tidak efektif.

SIMPULAN

Setelah dilakukan evaluasi terhadap kebijakan operasional satuan polisi pamong praja di kota Pekanbaru diketahui bahwa pelaksanaan operasional polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari efektifitas yang dicapai, efisiensi penggunaan sumberdaya, kecukupan terhadap solusi masalah yang diberikan kepada pedagang dan masalah resposivitas petugas lapangan serta ketepatan terhadap manfaat yang diperoleh.

Faktor yang menjadi kendala pelaksanaan kebijakan operasional satuan polisi pamong praja di Kota Pekanbaru adalah:

- a) Sosialisasi kepada masyarakat. mengenai aturan yang berlaku belum dipahami dengan baik.
- b) Ketersediaan sumber daya masih terbatas.
- c) Sikap petugas pelaksana di lapangan kurang simpatik.
- d) Dukungan dari masyarakat semakin meningkat.

DAFTAR RUJUKAN

- Aprilia, Hera. *Evaluasi Pelaksanaan Program Transmigrasi Lokal Model Ring 1 Pola Tani Nelayan di Bugel, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo dan Gesing, Kec. Panggang Kab. Gunung Kidul*. (Tesis tidak dipublikasi). (Yogyakarta: MPKD Universitas Gadjah Mada. 2009.
- Dunn William, 2003, *Public Policy Analysis : An Introduction*. Englewood Cliffs. N.J. : Prectice - Hall. Inc.
- Islamy, M. Irfan. 1992, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negera*, Cet.6. Jakarta. Bumi Aksara.